

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta, 2009.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2014.

Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya.

_____, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

_____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Bagir Manan, *Menemukan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009.

_____, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2015.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta 2000.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

_____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009.

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai*

Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999.

_____, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil : Problematik Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1999.

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marrliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988.

Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010.

Dwidja Priyatno, *Kriminalisasi Kebijakan, Wajah Hukum Pidana, Asas dan Perkembangannya*, Gramata, Jakarta, 2012.

Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

H.Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Hamzah, A. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State (Teori Umum Hukum dan Negara-Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)* Alih Bahasa Somardi, Media Indonesia, Jakarta, 2006.

Harjono, *Konsitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2008.

Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Hasyim, S., *Pancasila dan Hukum Budaya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Hendra Safri, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Palopo, 2018.

- I.G.M. Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis, Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi Dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- _____, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro dan Makro*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.
- Jan Michiel Otto (et.all), *Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Larasan, Edisi Pertama, Denpasar, Bali, 2012.
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Kristwan Genova, *Antara Uang Pengganti dan Kerugian Negara*, Masalah-masalah Hukum, Jilid 45 No. 1, Januari 2016.
- M. Yahya Harahap, *PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1998.
- Mahkamah Konstitusi, *Pancasila : Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jakarta, 2015.
- Miyasto, *Desentralisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Dalam Pemulihan Ekonomi dan Otonomi*, Lembaga Studi Pembangunan Indonesia, Jakarta, 2001.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.
- Nasucha, Rohmadi, dan Wahyudi, *Bahasa Indonesia untuk Karya Tulis Ilmiah*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2009.
- Ni'matul Huda dan R. Nazriya, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nuda Pedia, Bandung, 2011.

- Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2015.
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- _____, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia : Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.
- Rahayu Prasetyaningstih, *Negara Hukum yang Berkeadilan*, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum UNPAD, Cetakan Pertama, Bandung, 2011.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Sadono Sukirno, *Makroekonomi, Teori Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung, 1992.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revlika Aditama, Bandung, 2006.

_____, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Shinta Agustina, et.al., *Penjelasan Hukum : Sifat Melawan Hukum Dalam Kasus Korupsi*, LeIP, Jakarta, 2016.

Soeprapto, Pancasila, *Konstitusi Press*, Jakarta, 2013

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2010.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005

Syamsu Muhamad Ainul, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, 2016.

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung.

_____, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Jurnal, Makalah, Artikel:

Andi Akhirah Khairunnisa, *Penerapan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal Manajemen Pemerintahan, Vol. 5 No. 1, 2018.

Arfiani, et., al., *Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil, dan Manusiawi : Studi Pemantauau Proses Penegakan Hukum Tahun 2020*, Riau Law Journal, Vol. 6 No. 1, 2022.

Arif Firmansyah, *Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia*, Jurnal Hukum Syiar Hukum, Vol. XIII No. 1, 2012.

Arif Setiawan dan Umar Ma'ruf, *Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13 No. 2, Juni 2018.

- Artidjo Alkostar, *Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime*, Makalah disampaikan dalam ceramah umum pelatihan hakim dan hakim ad hoc Tipikor, Diklat MA-RI, 5 Desember 2010.
- Astika Nurul Hidayah, *Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18, No. 2, 2018.
- Bakti, B.A., *Pemberantasan Korupsi di Singapura*, Jurnal Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Vol. 1., 2014.
- Bambang Arjuno, Masruchin Ruba'I, dan Prija Djatmika, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Indonesia*, Jurnal Selat, Vol. 4 No. 2, 2017.
- Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 7 No. 2, 2022.
- Ediwarman, *Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan : The Human Rights Protection in The Process of Justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 1 No.1, 2000.
- Elviandri, Dimiyati, dan Absori, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan : Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31 No. 2, 2019.
- Fadhilah, E.A., Dewi, D.A., dan Furnamasari, Y.F, *Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila*, Jurnal Pnedidikan Tambusai, Vol. 5 No. 3, 2021.
- Felicia Edbert dan Tundjung Herning Sitabuana, *Keuangan Negara dan Kerugian Negara di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Serina IV, UNTAR, 2022.
- Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13 No. 25, 2017.
- Gofina A., dan Oktaviana, G. *Euthanasia dalam Perspektif Pancasila dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah, Vol. 8 No. 4, 2023.
- Gunawan Widjaja, *Pembuatan Undang-Undang Dan Penafsiran Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VI. No 1 Juli 2006.

- Hanafi, *Hakekat Nilai Persatuan Dalam Konteks Indonesia : Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3 No. 1, 2018.
- Heilbrunn, J.R., *Anti Corruption Commissions Panacea or Real Medicine to Fight Corruption?* Word Bank Institue, 2004.
- Hemold Ferry Makawimbang, *Memahami Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015.
- Herman Katimin, *Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam Menentukan Hukuman Mati pada Tindak PIDana Korupsi*, SASI, Vol. 26 No. 1 Januari-Maret 2020.
- I Komang Ugra Jagiwirata dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, *Pengaturan Kerugian Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PIDana Korupsi*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 10 Tahun 2023.
- Ian Scott, *Engaging the Public: Hong Kong's Independent Commission against Corruption's Community Relations Strategy*, Research in Public Policy Analysis and Management 23, November 2013.
- Ilham Fajar Septian dan Ali Abdurahman, *Status Hukum Penjelasan Undang-Undang*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-51 No. 3, Juli-September 2021.
- Irfani, *Grey Area Antara Tindak PIDana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan*, Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 6, 2011.
- Jaka Mulyata, *Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015.
- Jon S.T. Quah, *Combating Corruption in Asian Countries: Learning from Success & Failure*, Daedalus 147, No. 3, 2018.
- Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 22 No. 1, Maret 2022.
- Kristwan Genova Damanik, *Antara Uang Pengganti dan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Masalah-masalah Hukum, Jilid 45 No. 1, Januari 2016.

- Luis de Sousa, Luis, *Anti-Corruption Agencies: Between Empowerment and Irrelevance*, Crime Law Soc Change. Vol. 53, 2010.
- Mega Anjarsari, *Studi Komparasi Hukum Pengaturan Asas Mekanisme Pengambilalihan Perkara (Takeover Mechanism Principles) Dalam Penyidikan Perkara Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Hong Kong Independent Commission Against Corruption*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.
- Melanie Manion, *Corruption by Design: Building Clean Government in Mainland China and Hong Kong*, Harvard University Press, Massachusetts, 2004.
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Mustafa Abdullah, *Mempertanyakan Kembali Kepastian Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Sistem Hukum Indonesia*, Legalitas, Volume IV No. 1, Edisi Juni 2013.
- Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior, Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 3, September 2020.
- Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung, *Kausalitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Stabilitas Keuangan Negara*, Dharmasiswa, Jurnal Fakultas Hukum UI, Vol. 2, 2023.
- Putu Hari Kurniawan, et.al., *Kedigdayaan Produk Domestik Bruto : Aspek Sejarah dan Popularitas di Masa Depan*, Jurnal Dialektika Publik, Vol.3 No.2, 2019
- Richard C LaMagna, *Changing a Culture of Corruption: How Hong Kong's Independent Commission Against Corruption Succeeded in Furthering a Culture of Lawfulness*, Trends in Organized Crime, Fall, 1999.

- Ricky, Muh. Tanzil Azis Rahimullah, *Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia : Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol. 12 No. 2, 2022.
- Rika Dwi Ayu Parmitasari, et.al., *Landasan Filosofis Metodologi Penelitian Multiparadigma : Suatu Pengantar*, Jurnal Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM) Vol. 1 No. 6, 2020.
- Rizki Agung, *Konsep Kerugian Perekonomian Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Jurist-Dixtion, 2020.
- Rudy M. Harahap, *Menghitung Kerugian Perekonomian Negara Berbasis Indikator Makro Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Kolom Ilmiah Warta Pengawasan Nomor 3 Tahun 2023.
- Sri Wahyuni Laia dan Sodialman Daliwu, *Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis di Indonesia*, Jurnal Education and Development, Vo.10 No. 1, 2022.
- Suhendar, *Unsur Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*, Jurnal Surya Kencana Satu :Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 7 No. 1, Maret 2017.
- Supriyanto, Supanto, Hartiwiningsih, *Redefinisi Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara” Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Amanna Gappa, Vol. 25 No. 2 September 2017.
- Taufik Rachman dan Lucky Raspati, *Menakar Makna Merugikan Perekonomian Negara dalam Undang-Undang Tipikor*, Nagari Law Review, Volume 4, No.2, April 2021.
- Trifena Julia Kambey, Tonny Rumpis, dan Altje A. Musa, *Analaisis Yuridis Mengenai Unsur Merugikan Perekonomian Negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen Vo. IX.NO.3, Jul-Sep, 2020.
- Tri Setia Darma Sinuraya, Widodo, dan Panji Suwarno, *Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Education and Development, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 9 No. 3 Edisi Agustus 2021.
- Tunjung Mahardika Hariadi, *Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia*, Recidive, Vol. 2 No. 2, September – Desember 2013.

Vicky Zaynul Firmansyah dan Firdaus Syam, *Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia*, *Integritas*, Jurnal Antikorupsi, Vol. 7 No. 2.

Wanna J, *Collaborative Government : Meanings, Dimensions, Drivers and Outcomes. Collaborative Governance : A New Era Of Public in Australia*, ANU E Press The Australian National University Canberra, Canberaa, 2008.

Yusdiyanto, *Makna Filosofis Nilai-nilai Sila ke-empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia*, *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 10 No. 2, 2016.

Zailan Harmaen Anggayudha dan Kayla Zevira Alfasha, *Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura*, *Jurnal Hukum Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 5 No. 1. Januari 2023.

Zainudin Hasan, et.al., *Pancasila dan Hak Asasi Manusia : Perpektif Menuju Manusia Yang Adil dan Beradab*, *Deposisi*, *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, Juni 2024.

Website:

Alifia Nur Faiza, *Cara Denmark Mengatasi Korupsi dan Perbandingannya dengan Indonesia*, *Sindo News*, 2022. [https:// international.sindonews.com/read/756429/41/cara-denmark-mengatasi-korupsi-dan-perbandingannya-dengan-indonesia-1651086283?showpage=al](https://international.sindonews.com/read/756429/41/cara-denmark-mengatasi-korupsi-dan-perbandingannya-dengan-indonesia-1651086283?showpage=al).

Erlina F. Santika, *Penyalahgunaan Anggaran Jadi Modus Korupsi Paling Jamak Sepanjang 2022*, *Katadata Media Network*, 2023. [https:// databoks.katadata.co.id/datapublish/ 2023/ 03/ 16/ penyalahgunaan-anggaran-jadi-modus-korupsi-paling-jamak-sepanjang-2022](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/penyalahgunaan-anggaran-jadi-modus-korupsi-paling-jamak-sepanjang-2022).

Hong Kong, *Prevention of Bribery Ordinance Cap. 201*, (Hong Kong, 1971), <https://www.elegislation.gov.hk>.

Hong Kong, *Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance Cap. 554*, 2000, <https://www.elegislation.gov.hk>.

Hong Kong, *Independent Commission Against Corruption Ordinance Cap. 204*, 1974, [Hong Kong e-Legislation - Home \(elegislation.gov.hk\)](https://www.elegislation.gov.hk).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Jagokata*, [https:// jagokata.com/ arti-kata-nasional.html](https://jagokata.com/arti-kata-nasional.html).

Monavia Ayu Rizaty, *Denmark dan Selandia Baru Negara Paling bersih dari korupsi pada 2020*, Katadata Media, 2021. [https:// databoks. katadata.co.id/ datapublish / 2021 / 07 / 27 / denmark – dan – selandia – baru – negara – paling – bersih – dari – korupsi – pada - 2020](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/27/denmark-dan-selandia-baru-negara-paling-bersih-dari-korupsi-pada-2020).

Refki Saputra, *Kerugian Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Kompas, 2023. [https:// www.kompas.id/ baca/ opini/ 2023/ 01/ 31/ kerugian-perekonomian-negara-dalam-tindak-pidana-korupsi](https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/31/kerugian-perekonomian-negara-dalam-tindak-pidana-korupsi).

ST. Burhanuddin, *Penerapan Unsur Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Merupakan Langkah Progresif Penegakan Hukum*, Jurnal Borneo, <https://jurnalborneo.co.id/berita/st-burhanuddin-penerapan-unsur-perekonomian-negara-dalam-tindak-pidana-korupsi-merupakan-langkah-progresif-penegakan-hukum/>

Teguh Kurniawan, *Hong Kong Independent Commission Against Corruption (ICAC) dan Peranannya dalam Pemberantasan Korupsi : Pembelajaran untuk Indonesia*, Departemen Ilmu Administrasi. [http:// teguh.kurniawans.net/ wp-content/ uploads/ 2017/ 03/ Hong-Kong-ICAC-2011.pdf](http://teguh.kurniawans.net/wp-content/uploads/2017/03/Hong-Kong-ICAC-2011.pdf).

Tim Korporat dan Hukum Bisnis, *Elements of Corruption in Singapore*, ACCA Global, 2020. [https:// www.accaglobal.com/ pk/ en/ student/ exam-support-resources/ fundamentals-exams-study-resources/ f4/ technical-articles/ sgp-corruption.html](https://www.accaglobal.com/pk/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f4/technical-articles/sgp-corruption.html).

Wendell Wong dan Andrew Chua, *singapore: Bribery and Corruption, The Legal500*, 2024. [https:// www.legal500.com/ guides/ chapter/ singapore-bribery-corruption/](https://www.legal500.com/guides/chapter/singapore-bribery-corruption/).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mtr, tanggal 17 Maret 2021.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 7 April 2021.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST. tanggal 21 Desember 2022.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Jakarta Pusat Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JKT.PST, tanggal 21 Desember 2022.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Surabaya Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, tanggal 11 Juli 2023.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg, tanggal 30 Januari 2023.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, tanggal 16 Februari 2023.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg, tanggal 30 Januari 2023.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 4950 K/Pid.Sus/2023, tanggal 14 September 2023.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.